

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM TUKAR GULING TANAH EKS BENGKOK KELURAHAN WATESALIT DAN KAUMAN DENGAN TANAH MILIK PT.PISMA GAJAH PUTRA

(Studi Kasus Pembangunan Perumahan Pisma Griya di Desa Kasepuhan Kabupaten Batang)

Perlindungan hukum ini harus memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, kepastian bagi para pihak. Para pihak harus mendapat ganti rugi yang seimbang agar sesuai dengan hak-hak nya. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Batang mengeluarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor :188.4/48/2000 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Eks Bengkok Perangkat Kelurahan Kauman dan Kelurahan Watesalit dengan Tanah Milik PT. Pisma Gajah Putra. Problematik penelitian ini adalah 1) Mengapa bisa terjadi tukar guling antara tanah eks bengkok Kelurahan Kauman dan Kelurahan Watesalit dengan tanah milik PT.Pisma Gajah Putra ? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang melepaskan hak atas tanah nya dan pihak yang mendapatkan hak atas tanahnya dalam rangka tukar guling tanah eks bengkok Kelurahan Kauman dan Kelurahan Watesalit dengan tanah milik PT.Pisma Gajah Putra ?.

Dalam mengungkap permasalahan dalam tesis ini maka teori yang digunakan adalah teori bekerjanya hukum dalam masyarakat menurut Robert B. Seidman dan Wiliam J. Chambliss.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris yang bersumber dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (wawancara). Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa penyebab tukar guling antara tanah eks bengkok Kelurahan Kauman dan Kelurahan Watesalit dengan tanah milik PT.Pisma Gajah Putra yaitu penggunaan tanah eks bengkok yang tidak dapat diperjualbelikan sehingga dengan tukar menukar. Perlindungan hukum yang diberikan untuk melindungi hak-hak para pihak, hak yang didapat pemerintah ialah ganti rugi sedangkan yang didapat PT.Pisma Gajah Putra adalah kepastian status hunian yaitu HGB. Saran kepada Pemerintah agar dalam pelaksanaan tukar guling tanah eks bengkok lebih teliti sehingga tidak terjadi kecurangan. Dan dalam prosesnya harus sesuai dengan peraturan yang ada.

Kata Kunci : Tukar Guling, Bengkok, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR PARTIES IN ROLLING RATES OF THE EX CROOKED LAND AMONG WATESALIT VILLAGE, KAUMAN VILLAGE AND PT. PISMA GAJAH PUTRA LAND (CASE STUDY IN THE CONSTRUCTION OF PISMA GRIYA HOUSING IN THE KASEPUHAN VILLAGE, DISTRICT OF BATANG)

Legal protection must fulfill elements of justice, benefits, certainty for the parties. The parties must get compensation in accordance their rights. Therefore, Local Government District of Batang issued a Decision Council of Chairman Parliaments District of Batang Number:188.4/48/2000 about Agreement of Ex Crooked Exchange among Kauman Village Officials, Watesalit Village Officials and PT. Pisma Gajah Putra. Problems of these research are 1) Why could happen rolling rates of the ex crooked land among Kauman Village Officials, Watesalit Village Officials and PT Pisma Gajah Putra? 2) How about legal protection for the parties who divest of the title on its own land and the parties who get the title on its own land in order to rolling rates of the ex crooked land among Kauman Village Officials, Watesalit Village Officials and PT.Pisma Gajah Putra ?

In exposing problems in this theist theory used is the theory of operation of law in society by Robert B.Seidman and Wiliam J.Chambliss.

Methods being used in this research are juridical and empirical approach that relies from data collection of primary and secondary.And then, they will be analyzed by qualitative analysis method. Data collection technique that will be used is field study (interview) and author will use qualitative data analysis.

The result of research shows rolling rates of the ex crooked land among Kauman Village Officials, Watesalit Village Officials and PT.Pisma Gajah Putra is caused by rolling rates of the ex crooked land and it can't be sold and bought. Legal protection for the rights of the parties. Local government gets compensation while PT Pisma Gajah Putra gets certainty of the occupancy status/ Right to Build. The advice for the government is rolling rates of the ex crooked lands must be done more carefully so there is no cheating. Beside that the implementation must be based on regulations.

Keywords : *Rolling Rates, Crooked Land, Legal Protection*